

**PURITANISME DALAM GERAKAN TAJDID MUHAMMADIYAH: TELAAH  
HISTORIS, EPISTEMOLOGIS, DAN SOSIO-KULTURAL**

Mira Salsabila<sup>1</sup>, Webrizal<sup>2</sup>, Maigus<sup>3</sup> Ahmad Lahmi<sup>4</sup>, Mursal<sup>5</sup>

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat<sup>1,2,3,4,5</sup>

[mirasalsabila74@gmail.com](mailto:mirasalsabila74@gmail.com)<sup>1</sup>, [webrizal22@gmail.com](mailto:webrizal22@gmail.com)<sup>2</sup>, [Maigusnasir22@gmail.com](mailto:Maigusnasir22@gmail.com)<sup>3</sup>  
[mursalrambe8@gmail.com](mailto:mursalrambe8@gmail.com)<sup>4</sup> [lahmiaahmad527@gmail.com](mailto:lahmiaahmad527@gmail.com)<sup>5</sup>

**ABSTRACT**

*This study examines the shift from culturalism to puritanism within the Muhammadiyah reform movement using a library research approach. Culturalism, characterized by religious practices rooted in local traditions and communal customs, encounters substantial transformation when confronted with Muhammadiyah's long-standing agenda of purification and modernization. Through analysis of official documents, scholarly literature, and Muhammadiyah's doctrinal texts, the study demonstrates that puritanism is not merely a rejection of local culture but an epistemological and institutional project aimed at restructuring religious authority, rationalizing worship, and redefining Islamic identity among Muhammadiyah adherents. This shift is shaped by the modernization of education, the expansion of digital media, social mobility, and increasing exposure to global Islamic discourses. The findings reveal that puritanism functions as a reformist framework that molds contemporary religious practices, authority structures, and organizational identity, while simultaneously generating contestation with existing culturalistic traditions in Indonesian Muslim society. The study contributes to the sociology of religion and Islamic movement studies, particularly regarding the relationship between religion and culture as well as contemporary Islamic reform.*

*Keywords: culturalism, puritanism, Muhammadiyah, reform (tajdid).*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan menganalisis pergeseran dari kulturalisme menuju puritanisme dalam konteks gerakan tajdid Muhammadiyah melalui pendekatan studi kepustakaan. Kulturalisme sebagai pola keberagamaan yang berakar pada tradisi dan adat lokal mengalami tantangan signifikan ketika berhadapan dengan agenda purifikasi dan modernisasi yang dikembangkan Muhammadiyah sejak awal abad ke-20. Dengan menelaah dokumen resmi, literatur akademik, dan naskah keagamaan Muhammadiyah, penelitian ini menemukan bahwa puritanisme tidak

semata-mata berupa penolakan terhadap budaya lokal, tetapi merupakan proyek epistemologis dan institusional yang menata ulang otoritas keagamaan, rasionalisasi ibadah, serta transformasi identitas keislaman warga Muhammadiyah. Pergeseran ini dipengaruhi oleh modernisasi pendidikan, ekspansi media digital, mobilitas sosial, dan berkembangnya wacana keagamaan global. Hasil penelitian menunjukkan bahwa puritanisme dalam Muhammadiyah berfungsi sebagai kerangka reformis yang membentuk praktik, struktur otoritas, serta identitas keagamaan modern, sekaligus menunjukkan adanya dinamika kontestasi dengan tradisi kulturalistik dalam masyarakat Muslim Indonesia. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan kajian sosiologi agama dan studi gerakan Islam, khususnya terkait hubungan agama–budaya dan pembaruan keagamaan kontemporer.

Kata kunci: kulturalisme, puritanisme, Muhammadiyah, tajdid.

### **A. Pendahuluan**

Islam di Nusantara tumbuh melalui proses historis yang panjang dan kompleks, sekaligus membentuk corak keberagamaan yang khas. Pada fase awal perkembangan Islam, praktik keagamaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh pola kulturalisme, yaitu bentuk keberagamaan yang melebur secara harmonis dengan tradisi dan budaya lokal. Kulturalisme di sini merujuk pada kecenderungan masyarakat untuk mempertahankan warisan adat sebagai bagian integral dari ekspresi keislaman, sehingga ritual dan simbol budaya, seperti slametan, tahlilan, upacara adat, serta penggunaan jimat atau sesajen tertentu, diterima sebagai bagian dari identitas kolektif. Keberislaman dalam konteks ini tidak berdiri terpisah dari struktur sosial dan

adat setempat; sebaliknya, ia hidup dalam ruang budaya yang telah mengakar kuat selama berabad-abad.

Dalam literatur Kemuhammadiyah, corak keberagamaan seperti ini sering disebut sebagai Islam tradisional, Islam kultural, atau Islam bercorak lokal. Model keberislaman tersebut mengutamakan otoritas lokal, seperti kyai tradisional, dukun kampung, pemangku adat, serta sesepuh desa, yang memiliki legitimasi sosial tinggi dalam menentukan tafsir keagamaan maupun praktik sehari-hari. Struktur semacam ini melahirkan suatu pola keberagamaan yang relatif stabil dan adaptif, karena perubahan ajaran atau ritual selalu dinegosiasikan dalam bingkai budaya lokal. Dengan demikian, Islam berkembang bukan

hanya sebagai doktrin normatif, tetapi juga sebagai institusi budaya yang menyatu dalam kehidupan masyarakat.

Namun, dinamika sosial, modernisasi pendidikan, dan masuknya wacana keagamaan global membawa dampak signifikan terhadap struktur keberagamaan tersebut. Pada awal abad ke-20, muncul gerakan reformis dalam Islam yang mendorong puritanisme, yaitu orientasi pemurnian ajaran dan penolakan terhadap praktik-praktik keagamaan yang dianggap tidak memiliki dasar syar'i. Puritanisme, dalam konteks ini, tidak sekadar dimaknai sebagai gerakan kembali kepada teks, tetapi sebagai upaya sistematis untuk membangun pola keberagamaan yang lebih rasional, modern, dan sejalan dengan prinsip Al-Qur'an dan Sunnah.

Muhammadiyah, sebagai salah satu gerakan pembaruan terbesar di Indonesia, berdiri di tengah ketegangan antara Islam kultural dan Islam puritan-modernis. Sejak awal kelahirannya, Muhammadiyah memposisikan diri sebagai gerakan tajdid dengan dua dimensi utama: purifikasi (pemurnian ajaran) dan

dinamisasi (modernisasi pemikiran). Gerakan ini menolak berbagai praktik kultural yang dianggap tidak sejalan dengan ajaran Islam, termasuk ritual sinkretik, takhayul, bid'ah, dan khurafat. Pemurnian bukan sekadar penolakan terhadap budaya lokal, tetapi merupakan strategi ideologis untuk membebaskan umat dari praktik-praktik yang dinilai menghambat kemajuan, rasionalitas, dan pembentukan masyarakat beradab (Syafrianto et al., 2024).

Pada titik ini, terjadi pergeseran mendasar dari pola kulturalisme menuju puritanisme dalam sejumlah komunitas Muslim di Indonesia, terutama yang menjadi bagian dari atau terpengaruh oleh gerakan tajdid. Pergeseran ini dapat dipahami sebagai transformasi identitas keagamaan masyarakat, di mana orientasi keislaman tidak lagi bertumpu pada tradisi lokal yang diwariskan turun-temurun, melainkan pada interpretasi agama yang dianggap lebih murni dan otoritatif. Perubahan tersebut juga memengaruhi struktur otoritas: tokoh adat atau pemuka keagamaan tradisional mengalami penurunan legitimasi, sementara ulama

modernis, mubaligh, dan pemimpin organisasi Islam modern seperti Muhammadiyah memperoleh ruang otoritas yang lebih besar (Syamsuddin, 2017).

Fenomena pergeseran ini menjadi semakin signifikan karena berlangsung di tengah penetrasi modernisasi, globalisasi informasi, dan ekspansi pendidikan formal yang meluas. Media cetak pada awal abad ke-20 dan media digital pada era kontemporer mempercepat distribusi ide-ide puritan, sekaligus memperkuat jejaring aktivisme Islam modernis (Muâ, 2015). Perubahan ini tidak hanya berdampak pada cara masyarakat menjalankan ritual ibadah, tetapi juga membentuk ulang pola pikir, relasi sosial, dan struktur moral dalam komunitas Muslim (Burhani, 2018).

Fenomena pergeseran dari praktik keagamaan berbasis kulturalisme menuju paradigma puritanisme merupakan salah satu isu sentral dalam studi gerakan Islam modern di Indonesia. Dalam konteks Muhammadiyah, dinamika ini memperoleh relevansi khusus karena organisasi ini sejak awal berdirinya menempatkan *tajdid*—dalam arti

pemurnian dan modernisasi—sebagai fondasi gerakannya (Mu'ti, 2016).

Kulturalisme keagamaan yang berkembang dalam tradisi Islam Nusantara, dengan karakter sinkretis dan adaptif terhadap budaya lokal, pada berbagai periode sejarah direspons oleh Muhammadiyah melalui agenda rasionalisasi, purifikasi praktik ibadah, serta penekanan pada rujukan tekstual yang lebih ketat terhadap Al-Qur'an dan Sunnah. Meskipun sejumlah kajian telah menjelaskan karakter puritanisme Muhammadiyah, sebagian besar penelitian tersebut lebih menyoroti dimensi teologis-formal atau menelaah aspek historis awal abad ke-20 tanpa menggali secara mendalam transformasi kontemporer yang dipicu oleh perubahan sosial, ekspansi media digital, dan peningkatan literasi keagamaan publik. Dengan demikian, kajian mengenai *bagaimana* pergeseran dari kulturalisme menuju puritanisme berlangsung dalam praktik sosial-keagamaan Muhammadiyah saat ini masih memperlihatkan sejumlah celah penting (Mulkhan, 2010).

Sejumlah studi terdahulu cenderung memposisikan puritanisme Muhammadiyah sebagai gejala doktrinal yang statis, padahal praktik keagamaannya terus mengalami dinamika yang dipengaruhi oleh mobilitas sosial warga Muhammadiyah, penetrasi wacana transnasional, serta penguatan lembaga pendidikan persyarikatan. Selain itu, penelitian yang secara spesifik membandingkan orientasi kulturalistik masyarakat Muslim Indonesia dengan pendekatan puritan-modernis Muhammadiyah sering kali tidak menggambarkan proses pergeserannya secara empiris maupun analitis. Dengan kata lain, terdapat *research gap* dalam memahami relasi antara kulturalisme Islam Nusantara dan puritanisme Muhammadiyah sebagai sebuah proses sosio-religius yang tidak linier, melainkan penuh tawar-menawar dan rekontekstualisasi. Celah inilah yang penting untuk ditangani, terlebih dalam situasi di mana masyarakat Muslim Indonesia terus mengalami diferensiasi sosial, urbanisasi, dan penetrasi ide-ide revivalisme global, yang secara langsung berpengaruh terhadap identitas keagamaan

komunitas Muhammadiyah (Haryanto, 2015).

Urgensi penelitian ini semakin kuat ketika dikaitkan dengan rumusan masalah: bagaimana Muhammadiyah memaknai puritanisme dalam kerangka tajdid; bagaimana proses pergeseran dari praktik kulturalistik menuju puritanisme berlangsung; dan faktor-faktor apa yang mendorong perubahan orientasi tersebut. Ketiga pertanyaan ini belum dijawab secara tuntas oleh literatur yang ada, terutama dalam konteks perkembangan mutakhir Muhammadiyah sebagai organisasi modern yang memiliki jejaring pendidikan, kesehatan, dan dakwah yang luas. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai pergeseran orientasi keagamaan ini penting bukan hanya untuk memperkaya analisis mengenai Muhammadiyah sebagai gerakan Islam reformis, tetapi juga untuk membaca dinamika Islam Indonesia secara lebih luas, khususnya di tengah kontestasi antara tradisi, modernitas, dan purifikasi. Dengan demikian, penelitian ini memiliki signifikansi teoretis dan praktis: secara teoretis berkontribusi memperkuat kajian sosiologi agama

dan studi gerakan Islam; secara praktis membantu memperjelas arah pengembangan pendidikan dan dakwah Muhammadiyah agar tetap kontekstual, moderat, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat muslim Indonesia kontemporer.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena pergeseran dari kulturalisme menuju puritanisme dalam konteks Muhammadiyah merupakan fenomena historis-teoretis yang dapat dianalisis melalui dokumen, literatur ilmiah, dan naskah resmi organisasi. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti menelaah konsep, gagasan, serta praktik purifikasi yang berkembang secara historis dan konseptual dalam Muhammadiyah tanpa melakukan pengumpulan data lapangan (Silalahi, 2006). Fokus penelitian diarahkan pada analisis terhadap teks, pemikiran, dan keputusan organisasi sebagai basis untuk memahami transformasi teologis, epistemologis, dan sosiologis yang terjadi.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder yang seluruhnya diperoleh melalui penelusuran literatur. Data primer meliputi dokumen resmi Muhammadiyah, seperti Keputusan Majelis Tarjih, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM), risalah tarjih, buku-buku tokoh Muhammadiyah, hasil Muktamar, serta naskah dakwah dan tafsir keagamaan yang merepresentasikan posisi ideologis organisasi. Data sekunder meliputi buku akademik, artikel jurnal nasional dan internasional, disertasi, tesis, prosiding ilmiah, serta publikasi ilmiah yang relevan dengan tema puritanisme, modernisme Islam, dan relasi budaya-agama. Seluruh sumber dipilih berdasarkan kredibilitas ilmiah, relevansi topik, dan kontribusinya dalam menjelaskan proses pergeseran dari kulturalisme menuju puritanisme.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui prosedur sistematis yang meliputi: (1) penelusuran literatur menggunakan kata kunci khusus pada repositori ilmiah (jurnal SINTA, Google Scholar, Scopus, dan perpustakaan digital Muhammadiyah); (2) seleksi

literatur berdasarkan tahun publikasi, relevansi substansi, serta kesesuaian dengan kerangka teoritik; (3) pencatatan dan pengorganisasian data ke dalam kategori tematik. Analisis data menggunakan metode analisis isi (content analysis) dengan langkah-langkah: reduksi data untuk menyaring informasi penting, kategorisasi tema seperti purifikasi, modernisme, otoritas keagamaan, dan relasi budaya; interpretasi teoretis menggunakan perspektif sosiologi agama dan studi gerakan Islam; serta sintesis argumentatif untuk membangun pemahaman komprehensif terkait pergeseran kulturalisme ke puritanisme dalam Muhammadiyah. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber teks, konsistensi argumentasi, dan penggunaan literatur ilmiah yang kredibel.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| <b>Defenisi</b>    | <b>Gerakan</b> |
| <b>puritanisme</b> |                |

Gerakan puritanisme dalam konteks studi keagamaan dipahami sebagai sebuah arus pembaruan yang berupaya mengembalikan praktik keislaman kepada prinsip-prinsip

normatif yang bersumber pada teks otoritatif, yakni Al-Qur'an dan Sunnah. Tujuan utama gerakan ini adalah pemurnian ajaran dari berbagai unsur yang dianggap menyimpang, seperti praktik-praktik budaya lokal yang tidak memiliki legitimasi teologis dan berpotensi menimbulkan sinkretisme. Dengan menekankan kembali ajaran dasar (scriptural dan doctrinal), puritanisme berupaya menciptakan struktur keberagamaan yang lebih konsisten, bebas dari unsur non-normatif, serta berorientasi pada ketundukan penuh terhadap prinsip tauhid dan syariat. Dalam pengertian ini, puritanisme bukan sekadar gerakan teologis, tetapi juga proyek epistemologis yang menata ulang dasar pengetahuan dan otoritas keagamaan dalam masyarakat (Mulkhan, 2010).

Secara sosiologis, gerakan puritanisme membawa implikasi pada penyeragaman moral dan pengaturan perilaku sosial yang lebih ketat, karena norma-norma yang ditetapkan merujuk pada standar universal yang dianggap superior dibandingkan adat lokal. Puritanisme biasanya mendorong pembentukan komunitas moral yang memiliki etos ketaatan,

disiplin syar'i, serta orientasi kehidupan yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip keagamaan yang diyakini murni (Burhani, 2018).. Dalam konteks ini, praktik adat atau ritual tradisional yang sebelumnya menjadi bagian integral dari identitas kultural masyarakat dihadapkan pada proses evaluasi normatif, sehingga hanya praktik yang dianggap tidak bertentangan dengan ajaran dasar yang dapat dipertahankan. Proses ini sering kali menimbulkan dinamika sosial berupa ketegangan antara kelompok reformis puritan dan kelompok yang mempertahankan otoritas budaya lokal (Muâ, 2015).

Fenomena puritanisme juga tercermin dalam penguatan kelompok reformis yang menolak ritual adat, penggunaan simbol-simbol magis, atau praktik keagamaan yang dinilai tidak memiliki dasar tekstual yang kuat. Kelompok-kelompok ini cenderung memprioritaskan pendekatan doktrinal yang menekankan pembacaan literal atau metodologis terhadap teks suci, sehingga menghasilkan praktik keagamaan yang lebih seragam dan terstandar. Dalam konteks gerakan Islam modern seperti Muhammadiyah,

puritanisme menjadi bagian dari strategi pembaruan yang tidak hanya bertujuan memurnikan akidah dan ibadah, tetapi juga membangun tata sosial yang rasional, modern, dan terbebas dari unsur yang dianggap memperlemah fondasi keislaman. Dengan demikian, puritanisme memainkan peran signifikan dalam membentuk arah transformasi pemikiran, praktik keagamaan, dan struktur otoritas sosial umat Islam di berbagai konteks historis dan geografis (Syamsuddin, 2017).

### **Puritanisme dalam Kerangka Pemikiran Muhammadiyah**

Pembahasan mengenai kulturalisme dan puritanisme dalam Islam Indonesia memerlukan definisi operasional yang jelas agar dapat dijadikan dasar analitis dalam penelitian. Kulturalisme dalam konteks Islam Indonesia merujuk pada pola keberagamaan yang berakar kuat pada tradisi lokal, praktik sosial, dan adat istiadat yang terintegrasi dengan ekspresi keislaman. Karakteristik kulturalisme ditandai oleh sifatnya yang adaptif, sinkretis, dan koersif antara nilai-nilai Islam dan nilai-nilai budaya setempat, sehingga menghasilkan bentuk keberagamaan

yang lentur, simbolik, serta sering kali bersifat komunal (Rahman & Hayat, 2025).

Secara epistemologis, kulturalisme memandang otoritas keagamaan tidak semata-mata berdasarkan teks, tetapi juga pada legitimasi tradisi, pengalaman historis, dan interpretasi kolektif masyarakat. Dalam historiografi Islam Nusantara, bentuk keberagamaan kulturalistik ini dipahami sebagai upaya Islam untuk menegosiasi ruang budaya yang telah eksis, sehingga muncul praktik seperti ritual adat, peringatan tradisi keagamaan, dan ekspresi seni yang dilekatkan pada identitas keislaman masyarakat (Rahman & Hayat, 2025).

Sebaliknya, puritanisme dalam Islam Indonesia merujuk pada orientasi keagamaan yang menekankan kemurnian ajaran, kembali kepada sumber-sumber normatif utama (Al-Qur'an dan Sunnah), serta kritik terhadap praktik keagamaan yang dinilai berpotensi menyimpang dari esensi syariat. Karakteristik puritanisme ditandai oleh upaya rasionalisasi ibadah, penyederhanaan ritus, serta penolakan terhadap ritual yang tidak memiliki dasar tekstual yang kuat.

Secara epistemologis, puritanisme berpijak pada pendekatan literal atau tekstual terhadap sumber ajaran serta menempatkan otoritas keagamaan pada dalil yang bersifat normatif, bukan pada tradisi lokal. Perbedaan orientasi antara kulturalisme dan puritanisme tercermin pada cara keduanya memandang relasi agama–budaya: kulturalisme melihat keduanya sebagai entitas yang dapat saling mengisi, sedangkan puritanisme memandang budaya sebagai sesuatu yang perlu disaring secara ketat agar tidak mengaburkan kemurnian doktrin keagamaan. Dalam konteks ini, pergeseran dari kulturalisme menuju puritanisme merupakan fenomena yang tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga sosial—di mana perubahan struktur masyarakat, pendidikan, serta wacana keagamaan global turut memengaruhi konfigurasi keberagamaan umat Islam Indonesia (Muâ, 2015).

Posisi historis Muhammadiyah dalam lintasan gerakan reformis Islam merupakan aspek penting untuk memahami pergeseran dari kulturalisme menuju puritanisme dalam masyarakat Muslim Indonesia.

Muhammadiyah berdiri pada 1912 dalam konteks sosial-keagamaan yang ditandai oleh dominasi praktik Islam tradisional berbasis kultur lokal, keberadaan otoritas keagamaan yang mengakar pada pesantren, serta kebutuhan modernisasi sebagai respons terhadap kolonialisme dan perubahan sosial. Dalam konfigurasi historis tersebut, Muhammadiyah memposisikan dirinya sebagai gerakan tajdid yang berfokus pada pemurnian ajaran (purifikasi) dan rasionalisasi praktik keagamaan. Gerakan ini dipengaruhi oleh pemikiran pembaruan Islam dari Timur Tengah—seperti Muhammad Abduh dan Rashid Rida—yang menekankan kesederhanaan ibadah, integrasi rasionalitas, serta penolakan terhadap praktik-praktik yang dianggap tidak memiliki dasar kuat dalam sumber normatif Islam. Oleh karena itu, sejak awal berdirinya, Muhammadiyah hadir sebagai aktor modernis yang secara ideologis berbeda dari pola keberagamaan masyarakat yang lebih bersifat kulturalistik (Sutanto, 2011).

Seiring perkembangan waktu, posisi Muhammadiyah semakin kokoh sebagai representasi utama gerakan

puritan-modernis di Indonesia, terutama melalui jaringan pendidikan, dakwah, dan sosial yang luas. Organisasi ini membangun sistem institusional yang memungkinkan internalisasi nilai-nilai puritanisme secara terstruktur, mulai dari sekolah, masjid, organisasi otonom, hingga media dakwah. Identitas historis ini menjadikan Muhammadiyah tidak hanya sebagai gerakan keagamaan, melainkan juga sebagai institusi modern yang menciptakan model keberagamaan baru di tengah masyarakat. Di sisi lain, posisi historis tersebut menunjukkan bahwa puritanisme Muhammadiyah bukan sekadar orientasi teologis, tetapi merupakan respon terhadap realitas sosial yang menuntut pembaruan. Dengan demikian, memahami Muhammadiyah dalam kerangka sejarah gerakan reformis Islam memungkinkan analisis yang lebih komprehensif mengenai bagaimana perubahan dari kulturalisme menuju puritanisme berlangsung dalam tubuh umat Islam Indonesia.

Kritik Muhammadiyah terhadap praktik kulturalistik Islam Nusantara berakar pada pandangannya bahwa keberagamaan harus dikembalikan

kepada kemurnian ajaran dan berlandaskan pada sumber-sumber normatif Islam. Dalam berbagai dokumen resmi, fatwa, serta praktik dakwahnya, Muhammadiyah menilai bahwa sejumlah tradisi keagamaan lokal—seperti ritual yang bercampur dengan adat, penghormatan berlebihan terhadap simbol-simbol budaya, maupun praktik seremonial yang tidak memiliki dasar kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah—mengandung potensi penyimpangan atau setidaknya mengaburkan esensi ibadah. Organisasi ini mempromosikan kerangka pikir purifikatif yang menempatkan rasionalitas, kesederhanaan ritus, dan kepatuhan tekstual sebagai prinsip utama, sehingga praktik-praktik yang dianggap bagian dari takhayul, bid'ah, atau khurafat diposisikan sebagai sesuatu yang perlu ditinggalkan. Sikap kritis ini bukan semata-mata penolakan terhadap budaya lokal, melainkan bentuk reformisme yang bertujuan mendorong masyarakat Muslim menuju pemahaman keagamaan yang lebih otentik, terstandarisasi, dan sesuai dengan kerangka tajdid. Dengan demikian, argumentasi Muhammadiyah terhadap kulturalisme tidak bersifat

reaktif, tetapi merupakan bagian integral dari orientasi ideologis dan metodologisnya dalam memurnikan praktik keagamaan.

Puritanisme dalam kerangka tajdid Muhammadiyah berfungsi sebagai orientasi metodologis yang menekankan pemurnian ajaran melalui kembali pada sumber utama Islam, rasionalisasi praktik keagamaan, serta penyederhanaan ritus agar selaras dengan prinsip tauhid. Dalam perspektif ini, puritanisme bukan sekadar penolakan terhadap praktik-praktik tradisional, tetapi merupakan strategi pembaruan yang menstrukturkan cara organisasi memahami dan menafsirkan ajaran agama. Kerangka tajdid Muhammadiyah bertumpu pada prinsip bahwa ibadah harus berbasis dalil yang kuat, bebas dari unsur sinkretik, serta dapat dipertanggungjawabkan secara teologis maupun metodologis. Oleh karena itu, puritanisme diwujudkan melalui pembinaan ibadah, penyusunan fatwa-fatwa yang menegaskan standar normatif, dan pembangunan institusi pendidikan serta dakwah yang mempromosikan pemahaman Islam yang rasional dan

tekstual. Dengan demikian, puritanisme menjadi fondasi epistemik bagi geliat pembaruan Muhammadiyah sekaligus kompas ideologis yang membedakannya dari bentuk keberagamaan kulturalistik dalam masyarakat Muslim Indonesia.

Pergeseran dari kulturalisme menuju puritanisme dalam masyarakat Muhammadiyah merupakan proses sosial-keagamaan yang berlangsung secara gradual dan dipengaruhi oleh dinamika internal maupun eksternal organisasi. Pada tingkat internal, konsolidasi pendidikan, pembinaan kader, dan otoritas tarjih berperan penting dalam memperkuat standar normatif yang mendorong warga Muhammadiyah meninggalkan praktik-praktik keagamaan berakar budaya lokal. Sementara itu, pada tingkat eksternal, mobilitas sosial, urbanisasi, peningkatan literasi keagamaan, serta relasi yang semakin intens dengan wacana keislaman global turut mempercepat pergeseran orientasi keberagamaan tersebut. Proses ini tidak berlangsung secara linier, tetapi melalui negosiasi antara tradisi dan modernitas, antara pengalaman sosial masyarakat dan tuntutan purifikasi

ajaran. Dengan demikian, dinamika pergeseran tersebut mencerminkan transformasi identitas keagamaan Muhammadiyah yang bergerak menuju bentuk keberagamaan yang lebih tekstual, terstandarisasi, dan selaras dengan kerangka reformisme modern.

Pendidikan, modernisasi, dan pembaruan pemikiran memiliki peran strategis dalam memperkuat orientasi puritanisme di lingkungan Muhammadiyah, terutama karena ketiganya menyediakan kerangka institusional dan epistemik bagi internalisasi nilai-nilai tajdid. Melalui sistem pendidikan yang terstruktur—mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi—Muhammadiyah mentransmisikan pemahaman keagamaan yang rasional, berbasis dalil, dan bebas dari unsur-unsur kulturalistik yang dianggap tidak memiliki legitimasi normatif. Modernisasi sosial-ekonomi, urbanisasi, dan ekspansi kelas menengah Muhammadiyah semakin memperkuat kecenderungan tersebut, karena kelompok masyarakat yang lebih terdidik cenderung mengadopsi praktik keagamaan yang terstandar dan formalistik. Di sisi lain, wacana

pembaruan pemikiran yang dikembangkan melalui forum tarjih, publikasi resmi, serta literatur keislaman modern membuka ruang refleksi kritis terhadap tradisi keagamaan lokal, sehingga menghasilkan orientasi puritan yang semakin kokoh. Kombinasi ketiga faktor ini menjadikan puritanisme bukan hanya produk teologis, tetapi juga manifestasi dari proses reproduksi pengetahuan dan transformasi sosial dalam tubuh Muhammadiyah.

Media, teknologi, dan mobilitas sosial memainkan peranan penting dalam memperkuat orientasi puritanisme di lingkungan Muhammadiyah, terutama melalui percepatan arus informasi dan perluasan akses terhadap wacana keagamaan global. Digitalisasi dakwah—baik melalui platform resmi Muhammadiyah, media sosial, maupun jaringan intelektual internasional—menghasilkan diseminasi pemahaman keagamaan yang lebih tekstual, terstandarisasi, dan selaras dengan kerangka purifikasi. Mobilitas sosial warga Muhammadiyah, termasuk meningkatnya partisipasi dalam

pendidikan tinggi, aktivitas profesional, dan jejaring transnasional, turut memperkenalkan mereka pada model keberagamaan modernis-reformis yang lebih rasional dan minimalis dalam ritus. Paparan terhadap literatur, ceramah, dan fatwa yang berorientasi puritan melalui media digital juga memperkecil ruang bagi praktik keagamaan kulturalistik yang bersifat lokal dan ritualistik. Dengan demikian, media dan teknologi tidak hanya bertindak sebagai saluran informasi, tetapi juga sebagai agen transformasi yang mempercepat konsolidasi puritanisme dalam identitas keagamaan Muhammadiyah kontemporer.

Kontestasi antara kulturalisme dan puritanisme dalam praktik keagamaan warga Muhammadiyah muncul dalam bentuk tarik-menarik otoritas, resistensi budaya lokal, dan proses negosiasi identitas yang terus berlangsung di tingkat komunitas. Di satu sisi, puritanisme yang diusung Muhammadiyah melalui keputusan tarjih, pendidikan kader, dan dakwah resmi menekankan standar ibadah yang berbasis teks dan menolak ritual yang dianggap tidak memiliki legitimasi syar'i. Namun, di sisi lain,

sebagian warga Muhammadiyah yang hidup dalam konteks budaya lokal tetap mempertahankan sejumlah praktik tradisional yang dipandang sebagai bagian dari identitas sosial atau kebutuhan komunal. Ketegangan ini menjadi arena diskursif yang menempatkan Muhammadiyah sebagai aktor reformis yang harus berhadapan dengan dinamika keberagaman masyarakat yang heterogen. Dalam konteks ini, kontestasi tidak hanya berupa perdebatan teologis, tetapi juga menyangkut persoalan legitimasi, otoritas simbolik, dan adaptasi cultural Islam di tengah transformasi sosial, sehingga memperlihatkan kompleksitas hubungan antara purifikasi ajaran dan realitas budaya yang mengitarinya (Ardhana & Ali, 2024).

Pergeseran menuju puritanisme membawa implikasi signifikan bagi pembentukan identitas keagamaan dan keorganisasian Muhammadiyah, terutama dalam cara organisasi ini meneguhkan diri sebagai gerakan modernis yang berorientasi pada pemurnian ajaran dan rasionalisasi praktik keagamaan. Identitas keagamaan warga

Muhammadiyah semakin ditandai oleh komitmen pada standar ibadah yang tekstual, minimalis, dan terlepas dari ritual-ritual berbasis adat, sehingga menciptakan bentuk keberagaman yang lebih universal dan tidak bergantung pada konteks budaya lokal. Pada tingkat kelembagaan, puritanisme mempengaruhi strategi dakwah, kurikulum pendidikan, pengambilan keputusan tarjih, serta pola interaksi dengan masyarakat luas, menjadikan Muhammadiyah tampil sebagai organisasi yang konsisten dalam mengusung agenda pembaruan. Namun, perubahan identitas ini juga menuntut kemampuan organisasi untuk menavigasi hubungan dengan komunitas Muslim yang lebih plural dan kulturalistik, sehingga implikasinya tidak hanya mempertegas diferensiasi Muhammadiyah, tetapi juga menuntut adaptasi strategis dalam menjaga relevansi dakwah dan perannya dalam kehidupan sosial-keagamaan Indonesia kontemporer (Bandarsyah, 2016).

Sintesis atas dinamika pergeseran dari kulturalisme menuju puritanisme dalam Muhammadiyah

menunjukkan bahwa perubahan ini memiliki relevansi penting bagi kajian gerakan Islam dan studi Kemuhammadiyah, karena mencerminkan transformasi identitas, epistemologi, dan strategi dakwah organisasi dalam menghadapi modernitas dan kompleksitas masyarakat Muslim Indonesia. Pergeseran tersebut mengungkap bagaimana Muhammadiyah mengintegrasikan purifikasi ajaran dengan pembaruan sosial melalui pendidikan, media, dan institusionalisasi otoritas keagamaan, sekaligus bagaimana proses ini berinteraksi dengan resistensi budaya lokal serta pluralitas praktik keberagamaan. Dari perspektif akademik, sintesis ini menegaskan kontribusi penelitian terhadap penguatan teori mengenai hubungan agama–budaya, dinamika modernisme Islam, dan rekonstruksi praktik keagamaan dalam konteks kontemporer. Selain itu, evaluasi atas pergeseran ini memberikan dasar bagi refleksi strategis terkait arah pengembangan dakwah dan pendidikan Muhammadiyah ke depan, sehingga relevansinya tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga praktis bagi penguatan peran

Muhammadiyah dalam lanskap Islam Indonesia modern (Setiawan, 2019).

### **Pergeseran yang Dibahas dalam Materi Kemuhammadiyah**

Pergeseran dalam materi Kemuhammadiyah mengenai transformasi dari praktik Islam berbasis tradisi menuju praktik yang lebih terstandar secara syar'i merefleksikan dinamika pembaharuan pemikiran Islam yang menjadi karakter utama gerakan Muhammadiyah. Secara konseptual, pergeseran ini merupakan respon terhadap kebutuhan untuk menegaskan kemurnian ajaran Islam melalui pembersihan praktik keagamaan dari unsur-unsur budaya lokal yang dianggap tidak memiliki landasan normatif dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam kerangka epistemologis Muhammadiyah, tradisi dan adat tidak serta-merta ditolak, tetapi ditempatkan kembali dalam posisi yang proporsional: praktik yang tidak bertentangan dengan prinsip tauhid dan syariat dapat diterima, sementara praktik yang dinilai berpotensi menghadirkan unsur bid'ah, khurafat, atau sinkretisme perlu direformasi. Dengan demikian, pergeseran ini menegaskan orientasi

rasional, purifikatif, dan modernistik yang berupaya menyelaraskan kehidupan keagamaan umat dengan prinsip-prinsip Islam otentik berbasis dalil, sekaligus menciptakan praktik beragama yang lebih sistematis, bersih dari penyimpangan, dan relevan dengan perkembangan masyarakat kontemporer (Abror & Zuhdi, 2018).

Perubahan otoritas keagamaan dari tokoh adat atau pemuka tradisional menuju ulama modernis, mubaligh, dan guru Muhammadiyah merepresentasikan transformasi epistemologis yang signifikan dalam lanskap keagamaan masyarakat. Pergeseran ini terjadi seiring dengan meningkatnya kebutuhan terhadap otoritas keagamaan yang memiliki kapasitas interpretatif berbasis teks normatif (Al-Qur'an dan Sunnah), metodologi tarjih, serta kompetensi pendidikan modern. Dalam konteks gerakan pembaruan Muhammadiyah, otoritas tidak lagi ditentukan oleh kedudukan genealogis, kharisma tradisional, atau legitimasi adat, melainkan oleh kemampuan ilmiah, kredibilitas pengetahuan keagamaan, dan integritas moral yang dapat

dipertanggungjawabkan secara rasional. Perubahan ini berdampak pada lahirnya struktur otoritas keagamaan yang lebih terbuka, meritokratis, dan berbasis kompetensi, sekaligus mendorong homogenisasi praktik keagamaan melalui penyebaran pemahaman Islam purifikatif dan modernis ke berbagai lapisan masyarakat (Rochmah & Munir, 2023).

Transformasi struktur sosial dari komunitas yang berlandaskan hubungan kekerabatan dan ikatan budaya menuju komunitas yang terbentuk atas dasar pemahaman keagamaan modern mencerminkan pergeseran mendasar dalam pola relasional dan orientasi sosial masyarakat. Dalam konteks perkembangan Muhammadiyah, perubahan ini muncul sebagai konsekuensi dari meningkatnya akses terhadap pendidikan modern, internalisasi prinsip rasionalitas dalam kehidupan beragama, serta penyebaran nilai-nilai purifikatif yang menekankan pemisahan antara praktik keagamaan dan tradisi lokal yang dianggap tidak memiliki legitimasi normatif. Komunitas yang sebelumnya terikat oleh solidaritas

genealogis, adat, dan ritual lokal mengalami reorientasi menuju bentuk komunitas baru yang ditentukan oleh kesamaan ideologis, komitmen keagamaan, dan keterikatan pada gerakan pembaruan. Pergeseran ini tidak hanya menghasilkan struktur sosial yang lebih inklusif dan terbuka bagi mobilitas sosial, tetapi juga mempercepat homogenisasi pola ibadah, pembentukan identitas kolektif modernis, serta lahirnya ruang sosial baru di mana otoritas dan kohesi komunitas ditentukan oleh afiliasi ideologis dan pendidikan keagamaan, bukan lagi oleh kedekatan kekerabatan atau kultur lokal.

Contoh konkret dalam sejarah Muhammadiyah menunjukkan bagaimana proses purifikasi ajaran Islam diwujudkan melalui penilaian kritis terhadap berbagai praktik keagamaan yang dianggap tidak memiliki landasan normatif. Penolakan terhadap tradisi slametan, penggunaan jimat, sesajen, serta ritual-ritual mistik mencerminkan upaya sistematis untuk membersihkan praktik keagamaan dari unsur-unsur sinkretis yang dipandang berpotensi menimbulkan penyimpangan teologis. Kritik tersebut tidak hanya didasarkan

pada pertimbangan teologis, tetapi juga pada pendekatan rasional yang melihat bahwa praktik-praktik tersebut menghambat perkembangan pemikiran keagamaan modern dan tidak sejalan dengan doktrin tauhid yang menjadi fondasi utama gerakan Muhammadiyah. Dengan demikian, penolakan terhadap ritual kultural bukan merupakan bentuk anti-budaya, tetapi reposisi budaya agar berada dalam kerangka yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bersumber pada wahyu, bukan pada tradisi lokal semata.

Sebagai alternatif terhadap praktik keagamaan berbasis tradisi, Muhammadiyah memperkenalkan bentuk-bentuk keberislaman baru yang lebih rasional, terstruktur, dan berorientasi pada pemberdayaan umat. Penggantian ritual kultural dengan bentuk dakwah bil hikmah, pengembangan majelis taklim, serta penerapan sistem pendidikan modern mencerminkan paradigma baru yang menekankan proses internalisasi nilai keagamaan melalui edukasi dan pemberdayaan sosial. Lebih jauh, pendirian sekolah, rumah sakit, dan panti asuhan merupakan wujud konkret dari ideologi Islam

berkemajuan yang tidak hanya berfokus pada aspek ibadah, tetapi juga pada pembenahan aspek sosial, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Keseluruhan langkah ini menunjukkan bahwa transformasi dari kulturalisme ke puritanisme dalam Muhammadiyah tidak hanya merupakan perubahan teologis, tetapi juga merupakan proyek modernisasi sosial yang bertujuan membentuk masyarakat muslim yang beriman, berilmu, dan mampu menghadapi tantangan peradaban modern.

Identitas ideologis Muhammadiyah dibangun di atas kerangka pemikiran yang menekankan kemurnian ajaran Islam melalui proses purifikasi akidah, ibadah, dan muamalah dari unsur-unsur yang tidak memiliki dasar kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Orientasi purifikatif ini merupakan respons terhadap berbagai praktik keagamaan yang berkembang dalam masyarakat, terutama praktik berbasis adat dan tradisi yang dinilai berpotensi menimbulkan penyimpangan teologis, sinkretisme, atau pemahaman yang tidak selaras dengan prinsip tauhid. Dalam konteks ini, identitas ideologis Muhammadiyah menempatkan

otoritas teks sebagai pedoman utama, sehingga produk pemikiran dan praktik keagamaan harus melalui proses argumentasi ilmiah dan metodologis, terutama melalui manhaj tarjih. Dengan demikian, "Islam yang murni" tidak dipahami sebagai sikap konservatif statis, tetapi sebagai usaha rasional untuk mengembalikan praktik keagamaan pada landasan yang autentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara epistemologis.

Di samping orientasi purifikatif, identitas ideologis Muhammadiyah ditandai oleh komitmen pada rasionalitas dan modernitas sebagai prasyarat bagi terbangunnya masyarakat Islam berkembang. Rasionalitas dimaknai sebagai kemampuan menggunakan akal untuk memahami teks, menimbang maslahat, dan menjawab problem sosial secara ilmiah, sehingga keputusan keagamaan maupun kebijakan organisasi tidak hanya berlandaskan dogma, tetapi juga pertimbangan objektif dan kontekstual. Modernitas dalam pemikiran Muhammadiyah diwujudkan melalui pembaruan sistem pendidikan, pengembangan amal

usaha, serta partisipasi aktif dalam bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi sebagai manifestasi keberislaman yang progresif. Dengan demikian, identitas ideologis Muhammadiyah bukan sekadar slogan normatif, tetapi sebuah konstruksi pemikiran yang mengintegrasikan kemurnian ajaran, rasionalitas metodologis, dan orientasi modernistik untuk menjawab tantangan kehidupan umat Islam secara holistik dan berkelanjutan (Ichwan, 2016).

### **Mengapa Pergeseran Ini Penting dalam Materi Kemuhammadiyah?**

Identitas ideologis Muhammadiyah dibangun di atas kerangka pemikiran yang menekankan kemurnian ajaran Islam melalui proses purifikasi akidah, ibadah, dan muamalah dari unsur-unsur yang tidak memiliki dasar kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Orientasi purifikatif ini merupakan respons terhadap berbagai praktik keagamaan yang berkembang dalam masyarakat, terutama praktik berbasis adat dan tradisi yang dinilai berpotensi menimbulkan penyimpangan teologis, sinkretisme, atau pemahaman yang

tidak selaras dengan prinsip tauhid. Dalam konteks ini, identitas ideologis Muhammadiyah menempatkan otoritas teks sebagai pedoman utama, sehingga produk pemikiran dan praktik keagamaan harus melalui proses argumentasi ilmiah dan metodologis, terutama melalui manhaj tarjih. Dengan demikian, "Islam yang murni" tidak dipahami sebagai sikap konservatif statis, tetapi sebagai usaha rasional untuk mengembalikan praktik keagamaan pada landasan yang autentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara epistemologis (Razi, 2015).

Di samping orientasi purifikatif, identitas ideologis Muhammadiyah ditandai oleh komitmen pada rasionalitas dan modernitas sebagai prasyarat bagi terbangunnya masyarakat Islam berkembang. Rasionalitas dimaknai sebagai kemampuan menggunakan akal untuk memahami teks, menimbang maslahat, dan menjawab problem sosial secara ilmiah, sehingga keputusan keagamaan maupun kebijakan organisasi tidak hanya berlandaskan dogma, tetapi juga pertimbangan objektif dan kontekstual. Modernitas dalam

pemikiran Muhammadiyah diwujudkan melalui pembaruan sistem pendidikan, pengembangan amal usaha, serta partisipasi aktif dalam bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi sebagai manifestasi keberislaman yang progresif. Dengan demikian, identitas ideologis Muhammadiyah bukan sekadar slogan normatif, tetapi sebuah konstruksi pemikiran yang mengintegrasikan kemurnian ajaran, rasionalitas metodologis, dan orientasi modernistik untuk menjawab tantangan kehidupan umat Islam secara holistik dan berkelanjutan (Ningrum & Zulkifli, 2023).

Kontribusi Muhammadiyah terhadap modernisasi Islam di Indonesia tercermin dari perannya dalam mendorong transformasi pemahaman dan praktik keagamaan menuju corak Islam yang rasional, purifikatif, dan berorientasi kemajuan. Melalui manhaj tarjih yang menekankan penggunaan dalil otentik serta pendekatan rasional dalam proses pengambilan keputusan keagamaan, Muhammadiyah secara konsisten mereformulasi berbagai praktik keislaman agar selaras dengan prinsip tauhid dan ajaran

normatif. Pembaruan ini tidak hanya memurnikan aspek akidah dan ibadah, tetapi juga membentuk tradisi intelektual modern di kalangan umat Islam Indonesia, di mana nalar ilmiah, argumentasi metodologis, dan pemaknaan kontekstual menjadi bagian integral dari kehidupan beragama. Pembentukan corak keberagamaan yang rasional tersebut menjadi fondasi penting bagi tumbuhnya pemikiran Islam modern di Indonesia, sekaligus membuka ruang bagi perkembangan diskursus keagamaan yang lebih kritis, terbuka, dan progresif (Adiwilaga, 2017).

Di luar bidang teologis, Muhammadiyah memberikan kontribusi signifikan melalui pembangunan institusi modern yang memadukan nilai-nilai keislaman dengan ilmu pengetahuan dan profesionalisme. Pendirian sekolah, universitas, rumah sakit, panti asuhan, dan berbagai institusi sosial-ekonomi menegaskan peran Muhammadiyah sebagai pelopor modernisasi kelembagaan Islam. Melalui amal usaha ini, Muhammadiyah memperkenalkan konsep bahwa keberagamaan harus diwujudkan dalam kerja-kerja sosial yang terukur,

efektif, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, modernisasi Islam tidak berhenti pada aspek pemikiran, tetapi diterjemahkan menjadi praktik kelembagaan yang memperkuat kapasitas sosial umat, memperluas akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta mengintegrasikan umat Islam dalam dinamika pembangunan nasional. Kombinasi antara rasionalitas teologis dan kemajuan kelembagaan inilah yang menjadikan Muhammadiyah aktor kunci dalam modernisasi Islam Indonesia secara substantif dan berkelanjutan (Haryanto, 2015).

Pergeseran dari kulturalisme ke puritanisme dalam konteks Muhammadiyah tidak dapat direduksi sebagai pertentangan sederhana antara budaya dan agama, melainkan merupakan transformasi paradigmatik yang menyentuh fondasi cara umat memahami, menghayati, dan mempraktikkan ajaran Islam. Transformasi paradigma keagamaan ini ditandai oleh reposisi sumber otoritatif, di mana tradisi lokal yang sebelumnya berfungsi sebagai rujukan utama dalam praktik keberagamaan mengalami peninjauan ulang berdasarkan

standar epistemik Al-Qur'an, Sunnah, dan metode tarjih. Pergeseran tersebut melahirkan pola keberagamaan baru yang menekankan rasionalitas, kemurnian ajaran, serta kesesuaian antara praktik keagamaan dan norma syar'i. Dengan demikian, perubahan yang terjadi bukan hanya menyangkut bentuk ritual, tetapi menyentuh ranah kognitif dan epistemologis umat, sehingga menghasilkan orientasi keberislaman yang lebih sistematis dan terukur (Muhsin & Ghufon, 2018).

Selain transformasi epistemik, pergeseran ini juga berdampak pada perubahan struktur otoritas sosial dalam komunitas Muslim. Otoritas yang sebelumnya bertumpu pada pemuka adat, pemimpin karismatik lokal, atau struktur genealogis, beralih kepada ulama modernis, mubaligh, dan intelektual yang memiliki otoritas berbasis ilmu dan metodologi keagamaan yang dapat urpendekatan ilmiah, rasional, dan berbasis bukti tekstual, sehingga praktik ibadah, etika sosial, dan tata kehidupan keagamaan semakin distandardisasi dan bebas dari unsur yang dianggap tidak memiliki legitimasi normatif. Dengan demikian, pergeseran ini

memunculkan tatanan sosial-keagamaan baru yang lebih meritokratis, rasional, dan modern, sekaligus memperkuat posisi Muhammadiyah sebagai aktor penting dalam pembentukan identitas Islam berkemajuan di Indonesia.

#### **D. Kesimpulan**

Pergeseran dari kulturalisme menuju puritanisme dalam gerakan tajdid Muhammadiyah merupakan transformasi penting dalam sejarah keagamaan Islam di Indonesia. Pergeseran ini bukan sekadar penolakan terhadap budaya lokal, melainkan merupakan proyek reformis yang bertujuan untuk memurnikan ajaran Islam, membangun kembali otoritas keagamaan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, serta merasionalisasi ibadah dan praktik keagamaan agar sesuai dengan prinsip-prinsip modern. Puritanisme dalam Muhammadiyah berfungsi sebagai kerangka reformis yang membentuk struktur otoritas, praktik keagamaan, dan identitas Islam yang lebih modern, rasional, dan sistematis. Namun, transformasi ini juga memunculkan ketegangan antara gerakan puritan dan praktik

keagamaan berbasis budaya lokal, yang menciptakan kontestasi dalam masyarakat Muslim Indonesia. Secara keseluruhan, penelitian ini memperkaya kajian sosiologi agama dan studi gerakan Islam dengan menggali dinamika hubungan antara agama, budaya, dan pembaruan dalam konteks Muhammadiyah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abror, I., & Zuhdi, M. N. (2018). Tafsir al-qur'an berkemajuan: exploring methodological contestation and contextualization of tafsir at-tanwir by tim majelis tarjih dan tajdid pp muhammadiyah. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 19(2), 249–277.
- Adiwilaga, R. (2017). Puritanisme Dan Fundamentalisme Dalam Islam Transnasional Serta Implikasinya Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa. *Journal of Governance*, 2(1).
- Ardhana, P., & Ali, H. (2024). A critical review of model of tajdid and tajrid muhammadiyah movements. *Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner*, 117–122.
- Bandarsyah, D. (2016). Dinamika Tajdid Dalam Dakwah Muhammadiyah. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 4(2), 67–74.
- Burhani, A. N. (2018). Pluralism, liberalism, and islamism: religious outlook of muhammadiyah. *Studia Islamika*, 25(3), 433–470.

- Haryanto, J. T. (2015). Relationship, Transformation and Adaptation of The Traditionalists Against Puritanism in Surakarta Indonesia. *Analisa Journal of Social Science and Religion*, 22(2), 239–253.
- Ichwan, M. N. (2016). MUI, Gerakan Islamis, dan Umat Mengambang. *Ma'arif: Arus Pemikiran Islam Dan Sosial*, 87–104.
- Mu'ti, A. (2016). Akar pluralisme dalam pendidikan Muhammadiyah. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 12(1), 1–42.
- Muâ, M. A. (2015). Pesantren dan Islam Puritan: Pelembagaan Tajdid Keagamaan di Lembaga Pendidikan Islam. *Tsaqafah*, 11(2), 273–290.
- Muhsin, I., & Ghufon, M. (2018). Geliat Puritanisme Islam di Indonesia: Menyibak Tabir di Balik Gerakan Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA) dalam Perspektif Sosiologis. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 12(1), 213–238.
- Mulkhan, A. M. (2010). *Marhaenis Muhammadiyah*. Penerbit Galangpress.
- Ningrum, V. A., & Zulkifli, Z. (2023). Penyebaran Kelompok Islam Moderat Dan Islam Puritan Di Indonesia: Kajian Khaled Abou El Fadl. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 9(2), 1–20.
- Rahman, A. G. S., & Hayat, M. (2025). Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam, Dakwah dan Tajdid. *Al-Khazin: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 66–72.
- Razi, S. (2015). Dari Islam Radikal ke Islam Pluralis Genealogi Gerakan Paderi dan Pengaruhnya terhadap Islam Pluralis di Perbatasan Minangkabau. *Masyarakat Indonesia*, 41(1), 15–27.
- Rochmah, N. H., & Munir, A. (2023). Interpretation of the Quran With a Philanthropic Approach (Tafsir At-Tanwir Study By Majelis Tarjih Dan Tajdid Pp Muhammadiyah). *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, 2(3), 310–330.
- Setiawan, B. A. (2019). Manhaj Tarjih Dan Tajdid: Asas Pengembangan Pemikiran dalam Muhammadiyah. *Tarlim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 35–42.
- Silalahi, U. (2006). *Metode penelitian sosial*. Unpar press.
- Sutanto, H. (2011). Proses Pembumian Konsep Tajdid Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam Modernis. *Dialog*, 34(1), 80–91.
- Syafrianto, S., Apris, A., Mursal, M., & Lahmi, A. (2024). Transformasi Pemikiran Muhammadiyah Dari Puritanisme Ke Kosmopolitanisme. *Journal Education And Islamic Studies*, 2(2), 79–90.
- Syamsuddin, M. (2017). Gerakan Muhammadiyah dalam Membumikan Wacana Multikulturalisme: Sebuah Landasan Normatif-Institusional.

*Jurnal Pemberdayaan  
Masyarakat: Media Pemikiran  
Dan Dakwah Pembangunan,  
1(2), 335–370.*